

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-XII/2014 TERKAIT KETENTUAN FORMASI JABATAN NOTARIS DALAM UUJN SEBAGAI SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS

Rizqia Gita Astiriani¹, Istislam², R.Imam Rahmat Sjafi'i³

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl.MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505
Email: astirizqiani@yahoo.com

Abstract

The objective of research was to analyze whether the stipulations of Notary rank formation in Notary Rank Act which were seen as “a naturalness” in Constitutional Court’s Decree No. 5/PUU-XII/2014 were actually the part of the requirements for Notary appointment. Research also aimed to analyze the effort that could be done to secure the right of Notary candidates who were already appointed as PPAT but were rejected after submitting the approval of appointment as Notary based on stipulations of Notary rank formation. The journal was arranged with normative juridical method and also with statute and concept approaches. Result indicated that the stipulations of Notary rank formation in Notary Rank Act which were seen as “a naturalness” in Constitutional Court’s Decree No. 5/PUU-XII/2014 were actually the part of the requirements for Notary appointment. The effort that could be done to secure the right of Notary candidates who were already appointed as PPAT but were rejected after submitting the approval of appointment as Notary based on stipulations of Notary rank formation was by putting down PPAT rank and reapplying for PPAT rank based on Notary rank region and also by giving attention to PPAT rank formation.

Key words: *constitutional court’s decree, notary rank formation, requirements for notary appointment*

Abstrak

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan formasi jabatan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dipandang sebagai “*suatu kewajaran*” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 sebagai satu kesatuan dari ketentuan syarat pengangkatan Notaris, dan untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak bagi calon Notaris yang telah diangkat sebagai PPAT dan mengalami penolakan dalam

¹Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang,

²Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,

³Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

pengajuan permohonan pengangkatan sebagai Notaris terkait ketentuan formasi jabatan Notaris. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan formasi jabatan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dipandang sebagai “*suatu kewajiban*” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 merupakan satu kesatuan dari ketentuan syarat pengangkatan Notaris. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak bagi calon Notaris yang telah diangkat sebagai PPAT dan mengalami penolakan dalam pengajuan permohonan pengangkatan sebagai Notaris terkait ketentuan formasi jabatan Notaris adalah melepas jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dapat mengajukan kembali jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan mengikuti wilayah jabatannya sebagai Notaris serta memperhatikan formasi jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Kata kunci: putusan mahkamah konstitusi, formasi jabatan notaris, syarat pengangkatan notaris

Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupan terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi. Kebutuhan tersebut berupa undang-undang, peraturan hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum. Salah satu aparat hukum dalam bidang keperdataan ialah Notaris sebagai Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar*) yang harus profesional karena mewakili negara menjalankan tugas dan fungsi sosialnya di dalam pembuatan akta sebagai alat bukti autentik.

Selaku pejabat pembuat akta yang berkaitan dengan hukum keperdataan, sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh negara atau pemerintah yakni membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang langsung berhubungan dengan hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum keperdataan yang dikenal dengan BW (*Burgerslijk Wetboek*), tepatnya buku keempat tentang pembuktian dan daluwarsa (*Van Bewujs en Verjaring*).⁴

Saat ini jabatan Notaris semakin populer dan keberadaannya semakin dibutuhkan di kalangan masyarakat. Hal ini karena masyarakat semakin mengetahui bahwa segala perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum perlu dilegalkan oleh Notaris. Sebagai contoh yakni pengurusan hak waris, jual beli,

⁴Andi Prajitno, **Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia**, Selaras, Malang, 2013, hlm. 3.

pemberian kuasa, dan lain sebagainya. Namun tidak banyak orang yang mengetahui tentang seluk beluk jabatan Notaris. Pada dasarnya, pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia didasarkan pada hukum positif yang mengatur jabatan Notaris dalam suatu undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang ditetapkan pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2004, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.

Dalam pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia masih terdapat persoalan yang perlu segera dicari solusinya. Sebagai contoh dari persoalan tersebut yakni terkait dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik di luar wilayah jabatannya sebagai Notaris. Dengan demikian pemerintah mengadakan revisi terhadap undang-undang tersebut. Sehingga pada tanggal 15 Januari 2014 Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (undang-undang Perubahan undang-undang Jabatan Notaris). Dengan diundangkannya undang-undang perubahan undang-undang Jabatan Notaris tersebut maka ketentuan yang diatur di dalam undang-undang tersebut telah berlaku dan mengikat khususnya bagi para Notaris.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, juga berlaku bagi para calon Notaris. Khususnya ketentuan dalam Pasal 3 yang berkaitan dengan syarat pengangkatan Notaris, yang berbunyi:

“Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;*
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;*
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;*
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;*
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;*

- g. *Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan*
- h. *Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”*

Para calon Notaris yang telah memenuhi segala persyaratan dalam Pasal 3 tersebut, pada kenyataannya tidak serta merta dapat diangkat sebagai Notaris. Hal ini terjadi seperti yang dialami oleh Muhammad Thoha lantaran pernah mengalami penolakan oleh petugas Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat pengajuan penempatan dirinya sebagai Notaris di daerah Bekasi Jawa Barat.⁵

Sebelum mengajukan permohonan pada petugas Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Muhammad Thoha telah dinyatakan lulus dalam ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tahun 2012 dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menemukannya di kota Bekasi. Atas dasar itu, dirinya mengajukan permohonan penempatan sebagai Notaris di kota yang sama. Namun petugas loket C Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak dengan alasan formasi sudah terbatas.⁶

Persyaratan yang diatur pada Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan bahwa Formasi Jabatan Notaris merupakan persyaratan mutlak dan utama untuk dapat atau tidaknya seseorang diangkat sebagai Notaris, apalagi sampai dilakukan penolakan atas pengajuan permohonan pengangkatan yang diajukan Pemohon hanya dengan alasan formasi terbatas tanpa memeriksa, menganalisa dan mempertimbangkan berkas dan data-data permohonan pengangkatan Notaris yang telah diajukan oleh Pemohon.

Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris terkait syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris tersebut, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

⁵ASH, **PPAT Persoalkan Aturan Penempatan Notaris**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ppat-persoalkan-aturan-penempatan-notaris>, diakses 4 Februari 2014 pukul 10.00 WIB.

⁶*Ibid.*

Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Yangmana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Notaris juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014, yakni:

“Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;*
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;*
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;*
- d. Sehat jasmani dan rohani;*
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;*
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;*
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan*
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”*

Selain itu calon Notaris juga harus melengkapi dokumen pendukung yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:

- a. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;*
- b. fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;*
- c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;*
- d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;*
- e. fotokopi kartu tanda penduduk;*
- f. asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;*
- g. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan*

h. bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.”

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 juga mengatur tentang tata cara pengangkatan notaris. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa *“Permohonan untuk pengangkatan notaris dengan memperhatikan formasi jabatan notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri”*. Selain itu peraturan tersebut juga telah memberikan pilihan bagi calon Notaris yang telah memenuhi syarat namun tidak dapat mengajukan permohonan pengangkatan karena faktor penuhnya formasi jabatan Notaris pada suatu wilayah kota/kabupaten. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Ketentuan formasi jabatan Notaris diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang Formasi Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa:

“Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.”

Dasar penentuan formasi jabatan Notaris, telah ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yakni:

“Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:

- a. kegiatan dunia usaha;*
- b. jumlah penduduk; dan/atau*
- c. rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.”*

Sedangkan dalam Pasal 22 Ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris mengatur, bahwa:

“Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah.”

Sangat jelas dalam norma Pasal tersebut bahwa formasi jabatan Notaris bukan sebagai persyaratan tetapi merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah saja. Kata “pedoman” dalam norma tersebut mengarah pada pengertian sebagai petunjuk. Sebuah petunjuk dapat dilaksanakan apabila memiliki nilai kebenaran. Dalam konteks ini sebuah petunjuk memerlukan parameter yang jelas dan terukur. Selain itu untuk ketentuan lebih lanjut mengenai formasi jabatan

Notaris diatur dalam Pasal 22 Ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris tersebut, selain memperhatikan aturan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, calon Notaris juga harus memperhatikan ketentuan mengenai formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris.

Selanjutnya menurut Muhammad Thoha, dengan menghubungkan norma dari Pasal 21 dan Pasal 22 Ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang ketentuan formasi jabatan Notaris dengan Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang syarat pengangkatan Notaris dapat ditafsirkan adanya norma tentang formasi jabatan Notaris sebagai bagian dari sebuah persyaratan untuk seorang calon Notaris dapat diangkat atau tidak sebagai Notaris jelas menimbulkan kekeliruan penafsiran dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas norma tersebut yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Selain itu Formasi Jabatan Notaris yang diartikan sebagai batas maksimal Notaris pada suatu daerah kedudukan dalam suatu Kabupaten/Kota adalah sebuah bentuk pembatasan. Pembatasan yang dapat dilakukan negara dalam aspek dan bidang apapun juga, termasuk pengangkatan Notaris haruslah mempunyai maksud yang jelas.⁷ Karena Konstitusi hanya mengakui dan membenarkan pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas

⁷Muhammad Thoha Hanafi, **Dalil-dalil Uji Materi UU Jabatan Notaris**, <http://kompasiana.com/post/read/dalil-dalil-uji-materi-uu-jabatan-notaris.html>, diakses 4 Maret 2014 pukul 10.20 WIB.

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, sebagaimana yang diatur pada Pasal 28J Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Norma Pasal 28J Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui undang-undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu *“dengan maksud semata-mata untuk menjamin ... dan untuk memenuhi tuntutan yang adil ...”*. Dengan perkataan lain, konstitusi dapat membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang-undang) untuk melaksanakan hak-hak yang dimilikinya dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan pembatasan yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya mengenai formasi jabatan Notaris tidak dapat dikualifisir dalam pengertian pembatasan yang dibolehkan konstitusi karena seperti Pemohon belum dapat memiliki hak-hak konstitusional yang ada dalam konstitusi.⁸

Hal tersebut yang menjadi alasan Muhammad Thoha untuk mengajukan gugatan pada Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang diajukan oleh Muhammad Thoha yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon berisi tentang permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 21 dan Pasal 22 Ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang Formasi Jabatan Notaris yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 penolakan Ditjen Administrasi Hukum Umum kepada Pemohon, bukan merupakan pelanggaran hak konstitusional karena ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberi pilihan kepada Pemohon agar dapat mengembangkan diri, kebebasan, dan tidak diskriminatif yang sejalan dan tidak bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945.

⁸*Ibid.*

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus gugatan yang diajukan oleh Muhammad Thoha berkaitan dengan formasi jabatan Notaris, yakni:⁹

“Bahwa dalil Pemohon angka 2 mengenai kewenangan Menteri untuk mengangkat Notaris pada wilayah/daerah tertentu dibatasi sesuai dengan formasi yang ada merupakan suatu kewajaran dalam pengisian jabatan tertentu dalam rangka menata pelayanan yang merata kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Nusantara yang merupakan satu kesatuan yang bulat secara utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia.”

Pengertian Formasi Jabatan Notaris dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris menjelaskan bahwa *“Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota,”* Sehingga dapat ditafsirkan bahwa formasi jabatan Notaris merupakan salah satu unsur agar seseorang dapat diangkat sebagai Notaris pada suatu wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya unsur tersebut dapat dijadikan sebagai syarat agar seseorang dapat diangkat sebagai Notaris.

Ditinjau secara yuridis, dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-XII/2014 kurang tepat apabila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini karena dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-XII/2014 dengan menggunakan kata *“....merupakan suatu kewajaran....”* yang disesuaikan dengan aturan Pasal 21 dan Pasal 22 Ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris dapat mengakibatkan calon Notaris yang telah memenuhi Syarat Pengangkatan Notaris tidak serta merta dapat diangkat sebagai Notaris. Selain itu untuk bertindak selaku Notaris, seseorang yang terlebih dahulu diangkat sebagai PPAT dan telah memenuhi syarat pengangkatan Notaris tersebut tidak memiliki kepastian mengenai pengangkatan dirinya sebagai Notaris. Sementara dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil yang sama di hadapan hukum.

⁹Paragraf 3:16, **Pertimbangan Hukum**, dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-XII/2014, hlm. 41.

Ketidakpastian yang diperoleh seorang PPAT yang hendak mengajukan permohonan untuk dapat diangkat sebagai Notaris pada wilayah jabatan yang sama dengan wilayah jabatannya sebagai PPAT tersebut perlu adanya sebuah perlindungan hukum. Karena pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum dan hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dapat diberikan kepada seorang PPAT yang hendak mengajukan permohonan untuk dapat diangkat sebagai Notaris pada wilayah yang sama.

Pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dibatalkan jika hakim konstitusi meyakini bahwa undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat final...”

Dalam Pasal 24C Ayat (6) Undang-undang Dasar 1945, mengatur bahwa Hukum Acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 50A Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan yang diajukan oleh Muhammad Thoha, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan ilmu pengetahuan untuk menafsirkan norma dari Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Jabatan Notaris sebagai dasar pertimbangan dan tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan. Dan dalam

hal memutuskan gugatan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga harus memperhatikan benar atau tidaknya suatu gugatan yang diajukan Pemohon bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yakni:

“Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”

Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan, bahwa:

“Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan ditolak.”

Dalam hal permohonan yang diajukan oleh Muhammad Thoha, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Muhammad Thoha tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan permohonan yang diajukan oleh Muhammad Thoha bertujuan untuk menjamin kepastian hukum antara Pasal 3, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Jabatan Notaris. Kepastian hukum juga diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Metode-metode dalam menafsirkan konstitusi sangat beragam. Para ahli juga mengemukakan banyak pandangan mengenai metode ini.

John H. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff mengemukakan beberapa metode utama dalam melakukan penafsiran konstitusi”, yaitu : *Interpretivism / Non-interpretivism, Textualism, Original Intent, Stare Decisis, Neutral Principles, Balancing*, atau kombinasi dari beberapa metode tersebut. Para hakim menggunakan pandangan atau kemampuan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri. Artinya, hakim-hakim berbeda dalam

melakukan penafsiran konstitusi, sehingga suatu saat para hakim akan saling bertentangan dalam menafsirkan konstitusi terhadap sebuah perkara tertentu.¹⁰

Soedikno Mertokusumo juga mengemukakan bahwa terdapat metode penemuan hukum melalui penafsiran oleh hakim, yaitu : Interpretasi Gramatikal, Interpretasi Sistematis atau Logis, Interpretasi Historis, Interpretasi Teologis atau Sosiologis.¹¹ Pandangan **Soedikno Mertokusumo** tersebut umum digunakan dalam kaidah tafsir hukum secara umum. Namun dalam metode tafsir konstitusi, metode interpretasi yang digunakan sedikit berbeda walaupun pada intinya penafsiran hukum tersebut dapat pula digunakan untuk menafsirkan konstitusi. Penafsiran hakim atas konstitusi sesungguhnya didasari pula pada pandangan hakim terhadap konstitusi itu sendiri, apakah hakim melihat konstitusi tersebut sebagai *the living constitution* atau sebagai *the moral constitution*.

Hakim atau kalangan akademisi maupun masyarakat umum yang menafsirkan konstitusi lebih cenderung menggunakan sumber-sumber original yang berupa pendekatan *text* dan *intention* yang biasa disebut sebagai kalangan *originalist*. Sedangkan hakim yang menggunakan pendekatan di luar pendekatan kalangan *originalist* disebut kelompok *non-originalist*. Selain pendekatan kalangan *originalist* dan pendekatan kalangan *non-originalist*, terdapat pula pendekatan kalangan *naturalist*.

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat permasalahan hukum normatif yang menarik untuk dianalisis, yakni Apakah ketentuan formasi jabatan notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang dipandang sebagai “*suatu kewajaran*” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 dapat digunakan sebagai syarat tambahan pengangkatan notaris ?; Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak bagi calon Notaris yang telah diangkat sebagai PPAT dan mengalami penolakan dalam pengajuan permohonan pengangkatan sebagai Notaris terkait ketentuan formasi jabatan notaris ?

¹⁰Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, **HASIL PENELITIAN PERKEMBANGAN PENGUJIAN PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)**, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2010, hlm. 55.

¹¹Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 57-61.

Jurnal ini disusun berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*concept approach*), yang didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini.

Pembahasan

A. Ketentuan Formasi Jabatan Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang Dipandang Sebagai “suatu kewajaran” Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 Sebagai Satu Kesatuan Dari Ketentuan Syarat Pengangkatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata. Sedangkan akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat. Dalam kaitannya dengan pengangkatan Notaris maka sudah sangat penting untuk memperhatikan penempatan wilayah kerja Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Yangmana antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat disebut sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Apabila mencermati ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris tidak menyebutkan bahwa formasi jabatan Notaris merupakan syarat pengangkatan Notaris. Namun dalam prakteknya sering dijumpai beberapa kasus pengangkatan dan penempatan wilayah kerja seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang saling berbeda. Hal tersebut akan berdampak terhadap akta-akta yang dibuatnya dan mempengaruhi keautentikan terhadap akta yang dibuatnya. Dan hal ini lah yang nantinya akan sangat merugikan masyarakat.

Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa tempat kedudukan seorang PPAT harus mengikuti tempat kedudukannya sebagai Notaris. Namun dalam prakteknya banyak warga negara Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan

pengangkatan sebagai Notaris dengan alasan formasi terbatas walaupun seluruh syarat pengangkatan Notaris yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah dipenuhi. Selain harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, calon Notaris juga harus memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini karena Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 8 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berhenti dari jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena melaksanakan tugas sebagai Notaris pada daerah Kota/Kabupaten yang lain daripada wilayah jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian seseorang yang telah lulus sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan juga telah menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris di wilayah jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan secara otomatis berhenti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan bahwa:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berhenti menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena diangkat dan mengangkat sumpah jabatan Notaris di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang lain daripada daerah kerjanya, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf c dapat diangkat kembali menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan wilayah kerja Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tempat kedudukan sebagai Notaris apabila formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk daerah kerja tersebut belum penuh.”

Di dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dijelaskan bahwa peraturan tersebut untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diberi kewenangan untuk

membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu adanya koordinasi kembali antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia untuk penetapan syarat pengangkatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat luas, karena apabila tidak mentaati aturan-aturan berkaitan dengan wilayah jabatan tersebut tentu akan berdampak terhadap keautentikan suatu akta yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Umum.

Ketentuan syarat pengangkatan Notaris selain diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris juga diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perpindahan Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Permohonan untuk pengangkatan Notaris dengan memperhatikan Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri. Namun ketentuan tersebut bukan termasuk dalam bagian syarat pengangkatan Notaris, meskipun telah disebutkan secara tegas langkah-langkah yang dapat ditempuh bagi seorang yang hendak mengajukan permohonan agar dapat diangkat sebagai Notaris.

Pada dasarnya Peraturan Menteri merupakan peraturan pelaksana yang harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹² Dalam hal ini Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris belum berdasar pada peraturan perundang-undangan jabatan notaris, yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹² Maria Farida Indrati, **Ilmu Perundang-undangan 1**, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 74.

Yangmana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur secara tegas dan tersurat tentang aturan tata cara pengangkatan Notaris yang harus memperhatikan Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan formasi jabatan Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang dipandang sebagai “....*suatu kewajaran*....” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 dapat digunakan sebagai syarat tambahan pengangkatan Notaris. Yangmana frasa “....*suatu kewajaran*....” memiliki makna suatu hal atau perbuatan yang sudah selayaknya atau seharusnya ketentuan formasi jabatan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini formasi jabatan Notaris sudah semestinya diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Namun dalam Undang-undang Jabatan Notaris ketentuan formasi jabatan Notaris diatur dalam pasal yang berbeda dengan pasal yang mengatur tentang syarat pengangkatan Notaris. Sementara banyak calon Notaris yang mengalami kesulitan pada saat hendak mengajukan permohonan pengangkatan sebagai Notaris dan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris.

Pengaturan ketentuan formasi jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Jabatan Notaris yang diletakkan secara terpisah dengan ketentuan syarat pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris dapat dianggap bahwa terdapat adanya tumpang tindih peraturan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Yangmana syarat pengangkatan Notaris dapat dimaknai sebagai suatu hal yang wajib untuk dipenuhi agar hak dari calon Notaris yakni hak untuk dapat diangkat sebagai Notaris dapat terlaksana. Namun dalam prakteknya, calon Notaris yang telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak serta merta dapat diangkat pula sebagai Notaris pada wilayah jabatan yang sama dengan wilayah jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasarkan fakta yang ada, frasa “....*suatu kewajaran*....” yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 mengandung makna bahwa ketentuan formasi jabatan Notaris adalah merupakan bagian dari ketentuan syarat pengangkatan Notaris. Sementara dengan meletakkan ketentuan

formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Jabatan Notaris secara terpisah dengan ketentuan syarat pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris dapat menyebabkan kesalahan dalam penafsiran. Maka seyogyanya ketentuan formasi jabatan Notaris dijadikan sebagai satu kesatuan dengan ketentuan syarat pengangkatan Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Berkaitan dengan syarat pengangkatan Notaris dan ketentuan formasi jabatan Notaris, terdapat adanya ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kewenangan pejabat umum yakni Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khususnya kewenangan dalam hal pembuatan akta dan keautentikan akta. Permasalahan lain yang muncul akibat ketidakpastian hukum antara ketentuan syarat pengangkatan Notaris dan ketentuan formasi jabatan Notaris yakni adanya keraguan yang dialami oleh masyarakat yang hendak membuat atau mengurus akta autentik.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Maka hendaknya ketentuan formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dijadikan sebagai syarat tambahan pengangkatan Notaris, sehingga tidak menimbulkan multitafsir antara ketentuan syarat pengangkatan Notaris dengan ketentuan formasi jabatan Notaris.

Ditinjau secara yuridis, dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-XII/2014 kurang tepat apabila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini karena dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-XII/2014 dengan menggunakan kata “....merupakan suatu kewajaran....” yang disesuaikan dengan aturan Pasal 21 dan Pasal 22 Ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris dapat mengakibatkan calon Notaris yang telah memenuhi Syarat Pengangkatan Notaris tidak serta merta dapat diangkat sebagai Notaris. Selain itu untuk bertindak selaku Notaris, seseorang yang terlebih dahulu diangkat sebagai PPAT dan telah memenuhi syarat pengangkatan Notaris tersebut

tidak memiliki kepastian mengenai pengangkatan dirinya sebagai Notaris. Sementara dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan teori penjatuhan putusan, hakim mempunyai wewenang dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014, putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat dianggap belum memberikan isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan setiap orang apa yang semestinya. Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua, yakni keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 dengan amar putusan menolak untuk seluruh permohonan yang dimohonkan oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengalami penolakan saat mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai pejabat Notaris pada wilayah kedudukan yang sama dengan wilayah kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak memberikan keadilan, baik keadilan distributif maupun keadilan kumulatif.

Pada dasarnya sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding* yang juga sesuai dengan kewenangan pokok Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Dua perkara tersebut tidak terkait dengan persoalan fakta, tetapi lebih pada pendapat dan kesesuaiannya dengan konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 yang menolak gugatan yang diajukan oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan persoalan fakta sebagai dasar pertimbangan.

Berdasarkan Pasal 56 Ayat (5) Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa undang-undang yang tidak bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 baik mengenai pembentukan maupun materinya, maka amar putusannya adalah menolak gugatan dari Pemohon. Sehingga dengan memperhatikan materi dari Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris, dapat dianggap bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris terkait ketentuan syarat pengangkatan Notaris bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Yangmana dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan hal-hal yang wajib untuk dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Notaris. Namun ketentuan mengenai formasi jabatan Notaris tidak termasuk di dalamnya. Sehingga ketentuan Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris dapat dianggap dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 terkait dengan hak mendapatkan kepastian oleh hukum.

B. Upaya Untuk Menjamin Hak-Hak Bagi Calon Notaris yang Telah Diangkat Sebagai PPAT dan Mengalami Penolakan Dalam Pengajuan Permohonan Pengangkatan Sebagai Notaris Terkait Ketentuan Formasi Jabatan Notaris

Notaris dan PPAT sebelum menjalankan tugas dan jabatannya sebagai seorang pejabat umum perlu mendapatkan perlindungan hukum, idealnya bentuk perlindungan hukum preventif. Hal tersebut karena hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Perlindungan hukum tersebut terdapat di dalam sebuah peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif tersebut hendaknya memiliki kejelasan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris telah dijelaskan bahwa tempat kedudukan seorang PPAT harus mengikuti tempat kedudukannya sebagai Notaris. Namun pada kenyataannya banyak calon Notaris yang mengalami kesulitan dalam mengajukan pengangkatan sebagai Notaris dengan alasan formasi terbatas, sementara untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diangkat sebagai Notaris telah dipenuhi. Dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berhenti dari jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena melaksanakan tugas sebagai Notaris pada daerah Kota/Kabupaten yang lain daripada wilayah jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian mereka yang lulus sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan juga telah menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris di wilayah jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan secara otomatis berhenti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dalam pengertian lainnya tindakan perlindungan preventif adalah tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan tindakan perlindungan hukum represif adalah tindakan perlindungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah adanya peristiwa hukum.

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang yang telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan telah memenuhi syarat pengangkatan jabatan Notaris berdasarkan pengaturan formasi jabatan Notaris di dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka atas dasar analisa yang telah dikemukakan di atas, Penulis memandang perlunya penegasan atas pengaturan formasi jabatan antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Yangmana antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan jabatan yang saling berkaitan. Dan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah disampaikan bahwa seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menjalankan tugas sebagai Notaris di luar wilayah jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara otomatis berhenti dari jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Sedangkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap seseorang yang telah

diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan telah memenuhi syarat pengangkatan Notaris. Sehingga banyak warga negara Indonesia yang mengalami kekecewaan atas ketidakjelasan Undang-undang Jabatan Notaris berkaitan dengan formasi jabatan Notaris. Meskipun Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta autentik yang berbeda dan landasan hukum dari keduanya pun berbeda, namun berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris yang tidak lain menyatakan bahwa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 hakim mengeluarkan amar putusan yakni menolak seluruh gugatan dengan alasan gugatan yang diajukan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon terhadap gugatan yang diajukan yang berkaitan dengan pengujian Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya pengujian Pasal 3 tentang ketentuan syarat pengangkatan Notaris dan Pasal 21 serta Pasal 22 tentang ketentuan formasi jabatan Notaris.

Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris memiliki makna bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan bagian dari Notaris. Sehingga tanpa melihat siapa yang terlebih dahulu mengeluarkan keputusan pengangkatan sebagai pejabat umum yang diberikan negara melalui pejabat negara yang berwenang, maka pejabat umum dalam sebutan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus diberikan tempat kedudukan yang sama untuk jabatan Notarisnya dengan daerah kerjanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sudah ditetapkan oleh pejabat negara dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia.

Berdasarkan analisa tersebut di atas, untuk menjamin hak-hak bagi calon Notaris yang telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan telah memenuhi syarat pengangkatan Notaris yang mengalami penolakan dalam pengajuan permohonan pengangkatan sebagai Notaris terkait ketentuan formasi jabatan Notaris, maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melepas jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dapat mengajukan kembali jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan mengikuti wilayah jabatannya sebagai Notaris serta memperhatikan formasi jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal tersebut dengan berdasar pada ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, Pasal 8 Ayat (1) huruf c dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, maka dapat disimpulkan :

1. Ketentuan formasi jabatan Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang dipandang sebagai *“suatu kewajaran”* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 merupakan satu kesatuan dari ketentuan syarat pengangkatan Notaris.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak bagi calon Notaris yang telah diangkat sebagai PPAT dan mengalami penolakan dalam pengajuan permohonan pengangkatan sebagai Notaris terkait ketentuan formasi jabatan Notaris adalah melepas jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dapat mengajukan kembali jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan mengikuti wilayah jabatannya sebagai Notaris serta memperhatikan formasi jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Prajitno, 2013, **Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia**, Selaras, Malang.

Maria Farida Indrati, 2007, **Ilmu Perundang-undangan 1**, Kanisius, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta.

Makalah :

Arsip dan Dokumentasi, 2014, **Pertimbangan Hukum Dalam Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-XII/2014**, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Arsip dan Dokumentasi, 2010, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, **HASIL PENELITIAN PERKEMBANGAN PENGUJIAN PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)**, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang **Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah**.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang **Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris**.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang **Formasi Jabatan Notaris**.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang **Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

Naskah Internet

ASH, **PPAT Persoalkan Aturan Penempatan Notaris**,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ppat-persoalkan-aturan-penempatan-notaris>.

Muhammad Thoha Hanafi, **Dalil-dalil Uji Materi UU Jabatan Notaris**,
<http://kompasiana.com/post/read/dalil-dalil-uji-materi-uu-jabatan-notaris.html>.

Kamus

M.Marwan dan Jimmy P, 2009, **Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)**, Reality Publisher, Surabaya.

